

MENUJU KAPITALISME RELIGIUS ?

*Iggi Haruman Achsien *)*

I. Pendahuluan

Sistem ekonomi adalah persoalan besar dalam ilmu ekonomi. Dan, sistem ekonomi adalah konsep besar yang menjadi fundamen, sebagai salah satu variabel sangat penting yang menentukan kinerja perekonomian.

Ketika suatu negara dihadapkan pada pilihan untuk menentukan suatu bentuk sistem perekonomiannya, tawarannya ada dua. Memilih yang sudah ada atau memajukan alternatif yang baru. Sistem besar yang sudah ada adalah kapitalisme dan sosialisme. Sudah banyak uraian yang mencoba mengkritisi kedua sistem tersebut. Bahkan jalan keluar sebagai alternatif perimbangan dari dua sistem tersebut juga ditawarkan. *Market Socialism*, sebagai *mixed system*, adalah contohnya. Indonesia juga mengajukan sistem yang berusaha menjadi jalan tengah di antara kedua sistem tersebut. Sebutannya sistem ekonomi Pancasila.

Sistem ekonomi Pancasila diajukan untuk menggantikan ekonomi terpimpin yang cenderung lebih sosialis. Sistem ekonomi terpimpin yang lebih sosialis tersebut dinilai gagal memberi momentum dan laju pembangunan yang diharapkan dan diperlukan. Bahkan menciptakan inflasi yang dahsyat, hingga 600%. Karenanya sistem ekonomi Pancasila diajukan sebagai jalan keluar. Sistem yang juga pada akhirnya kembali dipertanyakan. Momentum mempertanyakan kembali tersebut adalah krisis ekonomi yang terjadi belakangan. Sistem ekonomi Pancasila juga dinilai tidak tahan banting, malah pelaksanaan pembangunannya yang ikut memperparah krisis yang terjadi. Kritik yang bisa diajukan pada sistem ekonomi Pancasila adalah konsepnya yang kurang jelas. Lebih cenderung sebagai "sistem ekonomi bukan-bukan", karena memberikan pengertian bukan kapitalisme bukan etatisme. Tidak ini, tidak itu.

Apa yang berkembang di Asia Tenggara selama ini, termasuk Indonesia, bisa dituding sebagai kapitalisme malu-malu. Atau *ersatz capitalism*, kalau menggunakan istilahnya Yoshihara Kanio. Mengatakan bukan kapitalisme, tapi kepemilikan pribadi sangat diagungkan, persaingan bebas pada akhirnya dibiarkan karena tuntutan liberalisasi, juga dibiarkannya korporasi yang main meraksasa dari penumpukan modal yang dilakukan tidak peduli secara bersih maupun rente. Dikatakan malu-malu atau inferior karena campur tangan pemerintah masih terlalu besar dan perkembangan teknologi yang dipunyai tidak memadai.

*) Iggi Haruman Achsien : Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Pada saat konsep baru hendak dilancarkan, seperti sistem ekonomi Pancasila tersebut, maka hendaknya mempunyai kejelasan dalam tataran konseptualnya. Karena kalau tidak, ia akan tenggelam dalam konsep yang telah ada. Nasib yang sama juga akan dialami oleh sistem ekonomi Kerakyatan yang didengungkan belakangan ini. Jika konsepnya juga tidak punya kejelasan, ia akan tenggelam - paling tidak - ke arah sosialisme. Adalah kemungkinan yang besar bahwa yang terjadi hanyalah perbedaan istilah, sementara substansinya sama saja. Arief Budiman menyebutkan faktor historis-aspiratif dan juga faktor filosofi dasar manusia yang dilupakan oleh konsep-konsep baru yang diajukan sebagai alternatif sistem ekonomi Indonesia tersebut.

Makalah ini dimaksudkan untuk menawarkan konsep alternatif bagi sistem perekonomian Indonesia. Tapi tidak lantas mengklaim sebagai sesuatu yang baru, atau lain sama sekali. Kecenderungan menawarkan "*old wine in new bottle*" berusaha untuk dihindari. Karena itu penulis justru menyatakan dari awal, bahwa makalah ini mencoba menggali kembali konsep-konsep klasik dari Saint Thomas Aquinas, Max Weber, Ibn Khaldun, Ibn Taimiyah, dan beberapa pemikir lainnya tanpa meminggirkan pemikir kontemporer dan sekaligus para futuris. Seperti kata Schumpeter, pemahaman masa kini tidak dapat dilakukan tanpa memahami masa lalu.

Pembahasan dalam makalah ini diawali dengan pengertian dasar sistem ekonomi untuk memberi pemahaman yang lebih baik untuk pembahasan selanjutnya. Berikutnya adalah catatan tentang normativisme dalam sistem ekonomi yang menjadi penting karena terkait dengan kapitalisme religius yang diajukan. Kemudian, *towards understanding of religious capitalism*, menuju pemahaman kapitalisme religius, akan tersusun dari pemahaman faktor-faktor yang menyusunnya. Berturut-turut kemudian adalah argumentasi atas pertanyaan "mengapa kapitalisme religius?" dengan melihat faktor filosofis, faktor historis-aspiratif, dan juga faktor yang bisa disebut futuristik.

II. Sistem Ekonomi : Beberapa Pengertian

Catatan awal sudah diberikan Fredric Pryor. Katanya, "*The Concept of an economic system is almost impossible to define exactly.*" Bisa jadi bahwa konsep sistem ekonomi bersifat dinamis, variabel yang dijelaskannya makin kompleks dan karenanya tidak dapat didefinisikan dengan tepat. Meski demikian beberapa pengertian mendasar sebagai ciri umum tetap diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang jelas. Pemahaman yang jelas berawal dari definisi.

Sistem ekonomi dapat dipandang sebagai mekanisme yang digunakan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Dari mulai produksi, distribusi, dan konsumsi. Morris Bernstein menyatakannya sebagai berikut ; Sistem ekonomi adalah seperangkat kesepakatan

dimana masyarakat menentukan: (1) apa yang diproduksi ?, (2) bagaimana memproduksinya?, termasuk (i) institusi-instrumen yang digunakan dan (ii) pola alokasi sumber daya, dan (3) bagaimana kepemilikan pribadi diberlakukan dan distribusi menyangkutnya (Bernstein, 1994).

Kurang lebih senada, Paul R. Gregory dan Robert C. Stuart, memberikan definisi sebagai berikut: “*Economic system is a set of mechanism and institutions for decision making and for the implementation of decisions concerning production, income, and consumption within a given geographic area.*” (Stuart & Gregory, “*Comparative Economic System*”, hal 16)

Sistem ekonomi adalah multidimensional. Fungsi dari sejumlah variabel. Atau dinyatakan sebagai berikut:

$$ES = f(A1, A2, \dots, An)$$

Berdasarkan definisi di atas, fungsi Es tersebut dapat difokuskan dengan empat variable saja, $n = 4$. Keempat variabel tersebut adalah;

- (1) organisasi pembuat keputusan,
- (2) mekanisme untuk alokasi sumber daya,
- (3) pengakuan hak milik (*property right*), dan
- (4) insentif yang mendorong tindakan.

Dua sistem besar, kapitalisme dan sosialisme, biasanya dikontradiksikan dengan merujuk pada variabel-variabel di atas sebagai berikut :

- (1) apakah desentralisasi atau sentralisasi,
- (2) apakah *market* atau *planned*,
- (3) apakah *private* atau *public*, dan
- (4) apakah material atau moral.

Sementara *mixed system*, seperti telah diduga, berusaha menjembatani kedua kutub ekstrem tersebut.

Dengan demikian, dengan melihat pada variabel-variabel model diatas, sistem ekonomi akan tampak ciri dan operasionalnya melalui institusi yaitu sebagai penyelenggara aktivitas ekonomi, instrumen yang digunakan yaitu fiskal, moneter, *exchange rate* untuk *social goods*, dan pola alokasi sumberdaya apakah melalui *command* atau pasar, tersentralisasi atau desentralisasi.

Setidaknya, ada empat pendekatan lain yang digunakan untuk memahami sistem ekonomi, yaitu (1) *DIM approach*, yang menggunakan *Decision making*, *Information*, dan *Motivation* sebagai penentu bagaimana keputusan dibuat, dikoordinasi, dan diimplementasikan, (2) *The ownership approach* sebagai kunci pemahaman sistem ekonomi, (3) *RCP approach*, yaitu *Rules, customs, dan Procedures* yang memfokuskan pada struktur institusional dari sistem, dan (4) *RDT approach*, yaitu *Rules, Decision Making, dan Transactions*.

Catatan yang penting diperhatikan adalah bahwa sistem ekonomi, meskipun fundamental adanya, juga tidak terlepas dari variabel lain sebagai penentu kinerja perekonomian. Bagaimanapun, jika sistem ekonomi merupakan landasan idealnya, ia perlu diinstitutionalisasikan dan diinstrumentasikan untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkannya.

“Saya juga tidak menyalahkan sistem-sistem itu sebab yang membuat sistem ekonomi atau tidak adalah faktor-faktor lain pula, seperti kualitas aparatnya, dedikasi serta mentalitas para pejabat dan pelaksana, stabilitas dan pimpinan politik, gangguan dan bantuan-bantuan dari luar, dan sebagainya” (M. Sadli, 19720).

Memang demikian adanya. Bahwa faktor-faktor yang menentukan kinerja perekonomian tidak hanya sistem ekonomi semata. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan Koopmans-montias framework, akan tampak bahwa *economic performance* setidaknya ditentukan juga oleh kebijakan pemerintah dan faktor lingkungannya, selain juga sistem ekonomi.

$$n(o) = n [f(e, s, ps)]$$

Dimana:

o = *economic outcomes*,

n = *weighted by norm*

e = *enviroment factor*,

ps = *government policies atau political economy*

Kurang lebih serupa dengan Koopmans-Montias framework di atas, Stuart & Gregory menyatakannya dengan persamaan berikut:

$$O = f(Es, Env, Pol)$$

Dimana

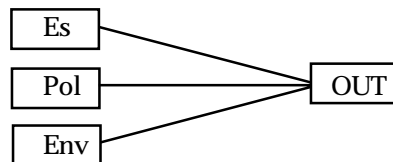
O = *output*,

Es = *Economic System*

Env = *Environemnt*

Pol = *Policies pursued by economic system*

Secara diagramis, model di atas digambarkan sebagai berikut:



Kalau dilihat lebih lanjut, setiap variabel sebenarnya dapat mempunyai korelasi satu sama lain. Sebab, dinyatakan pula bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi di antaranya adalah faktor tingkat pembangunan ekonomi yang dinyatakan dengan berbagai indikatornya, faktor sosial dan budaya seperti ideologi dan agama, dan juga faktor lingkungan macam populasi serta demografi (Bernstein, 1994). Sebagai contoh, tingkat pembangunan ekonomi sebagai *economic outcomes* akan mempengaruhi sistem ekonomi, pada saat sistem yang digunakan ditinjau kembali. Melalui berbagai indikator kinerja tersebut akan dievaluasi apakah sistem ekonomi yang digunakan dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Ketika China melihat bahwa sosialisme tidak efektif untuk perkembangan ekonomi yang diharapkan, maka negara ini pelan-pelan beralih ke kapitalisme. Hal yang sama juga terjadi di Rusia.

III. Normativisme Dalam Sistem Ekonomi

Jelas bahwa sistem ekonomi mempengaruhi kinerja perekonomian. *Economic outcomes* atau kinerja perekonomian dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Ilmu ekonomi cenderung menitikberatkan pada ukuran kualitatif, karena terpengaruh pandangan Newtonian-cartesian. Lihat saja, yang dipakai biasanya adalah ukuran-ukuran seperti pertumbuhan (*growth*), *level output*, efisiensi – statis maupun dinamis, stabilitas harga (*inflation*) dan seterusnya.

Padahal sistem ekonomi yang merupakan bagian dari ilmu ekonomi merupakan ilmu yang paling bergantung pada nilai dan paling normatif di antara ilmu-ilmu sosial lainnya. Model dan teorinya akan selalu didasarkan pada sistem nilai tertentu pada pandangan tentang hakikat manusia tertentu, pada seperangkat asumsi yang disebut Schumacher sebagai meta-ekonomi karena tidak pernah dimasukkan secara eksplisit pada ekonomi kontemporer. Ekonomi kontemporer, dengan tujuan memberikan keketatan ilmiah pada disiplinnya, telah menghindari isu nilai tersebut. Berkecenderungan kuat untuk menjadi positivistis, menjauhkan betul dari normativisme.

Penghindaran isu yang terkait dengan nilai itu telah menyebabkan ahli ekonomi mundur ke masalah-masalah yang lebih mudah tapi kurang relevan, dan menutupi pertentangan-pertentangan nilai yang terjadi dengan mengguankan bahasa teknis yang panjang lebar. Pilihan-pilihan sosial dan moral beralih menjadi sekedar pilihan yang bersifat pseudo-teknis yang diam-diam menyembunyikan konflik nilai tersebut.

Seperti telah disebut diatas, nilai yang muncul dalam model ekonomi belakangan ini hanyalah nilai kuantitatif yang cenderung mengabaikan faktor sosial psikologis, filosofis, dan juga budaya. Model kuantitatif abstrak yang pada akhirnya justru akan membuat kesenjangan antara teori dan realitas. Fukuyama, mengatakan – dengan menyebut

diantaranya Milton Friedman, Gary Becker, dan George Stigler – bahwa mereka, katakanlah, delapan puluh persen benar. *Eighty percent correct*. Telah membongkar “kebenaran” (atau kebetulan, betul=kebenaran?) penting tentang uang dan pasar karena model fundamental yang rasional, tingkah laku yang *self-interest* telah menyumbang delapan puluh persen sepanjang waktu. Tapi ada “*The Twenty Percent solution*” yang tertinggal, yang tidak diberikan *neoclassical economics*. Padahal Adam Smith pasti mengerti betul kalau ekonomi terkait dengan kehidupan sosial, tidak dapat dipahami jika terpisah dari kebiasaan, moral, dan tingkah laku masyarakat. Lihat saja “*The Theory of Moral Sentiments*” yang ditulis Adam Smith.

Karena itu, evaluasi kembali atas keseluruhan landasan konseptual dan melakukan perancangan ulang menjadi sangat penting. Pengujian kembali konsep dan model ekonomi yang perlu mengintegrasikan sistem nilai yang mendasari dan mengenali hubungannya dengan konteks budaya.

Sebagai contoh, Schumacher menggambarkan ketergantungan sistem ekonomi pada nilai dengan membandingkan dua sistem ekonomi yang mempunyai nilai dan tujuan yang berbeda sama sekali. Yang pertama, sistem materialis, dimana standar hidup diukur dengan jumlah konsumsi tahunan dengan tujuan konsumsi maksimum melalui pola optimalisasi produksi, yang kedua, disebutnya sistem ekonomi budha, yang didasarkan pada pengertian ‘mata pencaharian yang benar’ dan “jalan tengah” yang tujuannya kesejahteraan manusia yang maksimum dengan pola konsumsi optimal (Schumacher, 1975).

Dengan demikian, sistem ekonomi sebagai satu landasan penting dalam pembangunan ekonomi sudah seharusnya mengintegrasikan positivisme dan normativisme. Antara pertimbangan rasional dan nilai atau moral. Di samping juga tidak melepaskan dari kenyataan historis-aspiratif, filosofis, dan faktor manusianya. Malah, Soedjatmoko menekankan betul tentang faktor manusia dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Faktor agama dan dorongan pembangunan ekonomi juga menjadi bahasannya.

IV. Menuju Pengertian Kapitalisme Religius

A. Kilas Balik : Pemikiran Thomas Aquinas, Ibn Taymiyya, Ibn Khaldun, dan Max Weber

Sistem ekonomi yang terkait dengan semangat religius, yang menghindarkan manusia dari keterasingan akibat sekularisme, dapat ditelusuri pada pemikiran Saint Thomas Aquinas (1225-1274) Max Weber (1905) untuk Kristen. Dan pada pemikir Islam terdapat di antaranya adalah Syed Nawab Haider Naqwi dan Masudul Alam Choudury. Secara ringkas akan diuraikan pemikiran-pemikiran Ibn Taymiyya, Ibn Khaldun, dan Max Weber yang terkait dengan sistem ekonomi.

Saint Thomas Aquinas. Seorang pendeta yang secara sistematis mempresentasikan teologi, moral, sosiologi, dan prinsip ekonomi yang dipengaruhi pendekatan Aristotelian. Pemikirannya yang komprehensif dengan struktur pemikiran yang merekonsiliasikan filsafat dan agama dituangkan dalam "*Summa teologica*". Di dalamnya terdapat doktrin pemikiran ekonomi yang menyangkut kepemilikan pribadi, *the just price*, tentang *distributive justice*, dan larangan *rente (usury)* atau *improper gains*.

Thomas Aquinas mendukung kepemilikan pribadi dengan dasar pemikiran bahwa hal tersebut sesuai dengan hukum alam menurut alasan kemanusiaan, untuk menfaat kehidupan manusia. Dikatakan pula bahwa *private production* akibat pengakuan *private property* memberikan stimulus yang lebih besar untuk aktivitas ekonomi dibandingkan dengan produksi bersama. Meski demikian, tidak lantas menjadi kepemilikan yang tidak terbatas seperti hukum Romawi. Aquinas merefleksikan ide *stewardship of wealth*. Bahwa yang lain memiliki hak untuk dibagi. Aquinas memperbolehkan pula pengaturan pemerintah untuk barang publik. Kemudian Aquinas mengakui pula pentingnya kegiatan komersial dan tindakan yang realistis dari adanya insentif. Yang dipermasalahkan Aquinas dalam "*Summa Teologica*" adalah tentang "*just price*", dengan pertanyaan, "*Whether a man may lawfully sell a thing for more than it is worth?*". Profit, dalam hal ini yang moderat, diperbolehkan jika pedagang mempunyai maksud terhormat, seperti *self support*, *charity*, dan *public service*. Karena Aquinas tidak memberikan spesifikasi nilai suatu barang yang katanya tidak bisa ditetapkan secara matematis, maka yang dimaksud dengan "*just price*" adalah harga berlaku yang terjadi di suatu tempat pada saat tertentu, yang ditentukan oleh perkiraan yang wajar (*fair-minded estimate*). Selanjutnya Aquinas melarang apa yang disebut *improper gains* yang dianggap sebagai *rente*.

Ibn Tamiyyah. Beliau merupakan seorang fuqaha, ahli hukum Islam, filosof, dan juga ekonom. Karya yang mempresentasikan pandangan-pandangan ekonominya adalah "*al-Hisha fi'l Islam*". Karyanya ini kemudian banyak diulas oleh pemikir ekonomi Islam kontemporer. Sebut misalnya Sherwani (1956), Ilyas Ahmad (1961) Islahi (1980) dan Kahf (1982).

Dengan menggunakan Qur'an dan Sunnah sebagai sumber yurisprudensi utama, Ibn Taymiyyah mendiskusikan dan menganalisa peranan *al-hisba*, *market supervisor* (pengawas pasar) dan pengembangan serta ciri kewajiban pemerintah. Dalam hal ini pemerintah seharusnya berperan dalam mendorong dilaksanakannya aturan main (*code of conduct*) yang Islami sehingga produsen, pedagang, dan agen ekonomi yang lain berlaku jujur dan adil dalam melakukan transaksi. Harus dapat dipastikan bahwa di pasar terjadi kompetisi yang adil, *even playing field*, sehingga bebas dari manipulasi dan eksploitasi. Menjadi kewajiban pemerintah juga untuk memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pada pasar yang demikian, Ibn Taymiyya mengajukan konsep "*price of equivalent*" yang menjadi dasar "*reasonable profit*". "*Price of equivalent*" adalah konsep pragmatis yang dapat

ditentukan dengan mempelajari kondisi pasar. Harga ditentukan *dalam a merket free of imperfection* (Kahf, 1982) melalui kekuatan *supply* dan *demand* (Siddiqi, 1982). Pandangannya tentang *market supervision* ini dilatari oleh kepeduliannya yang sangat besar pada keadilan dan *fair play*. Pandangannya tentang hak kepemilikan dapat dikatakan menggunakan pendekatan *individualism conscious of mutual responsibilities*. Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, beberapa pengulasnya mengatakan bahwa pemikiran Ibn Tamiyya kurang lebih sejajar dengan konsep modern *welfare state*.

Ibn Khaldun. Sering dikatakan sebagai ekonom terbesar Islam, selain sebagai seorang sejarawan dan filosof. Karyanya yang monumental, "*Muqaddimah*", atau "*The prologema*" atau "*The Introduction*" dikerjakan selama empat tahun (1375-1379). Analisisnya yang hati-hati memberi kontribusi atas study tentang penyebab *underdevelopment*. Ciri khas dalam melakukan pendekatan terhadap persoalan ekonomi adalah kesediannya untuk menggunakan pertimbangan berbagai faktor seperti geografis, etnik, politik, dan sosiologis dalam situasinya. Beliau tidak membatasi pada apa yang disebut faktor ekonomi saja. Dapat dikatakan sebagai peletak awal analisis yang holistik dan integratif.

Lingkup pemikirannya meliputi teori nilai, hukum *supply* dan *demand*, produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan, uang dan modal, *division of labor*, *capital formation* dan pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, *public finance*, dan tanggung jawab ekonomi pemerintah. Rekomendasi kebijakannya didasari oleh analisisnya atas apa yang terjadi dengan mendasarkan pada "*the dictates of reason as well as ethics*", menunjukkan pertimbangan positif sekaligus normatif.

Yang diambil di sini adalah terkait dengan sistem ekonomi. Tentang mekanisme alokasi sumber daya, hak kepemilikan, dan institusi pengaturan. Ibn Khaldun menekankan pentingnya kepemilikan pribadi dan efisiensi ekonomis. Ibn Khaldun mendahului pemikiran Adam Smith dalam beberapa hal, yaitu *division of labour* dan *free market system*. Beliau menentang intervensi pemerintah dan mempercayai efisiensi pasar bebas. Berikut dikutip dari *Muqaddimah*:

"Know then that the arbitrary appropriation by the government of men's property result in loss all incentives to gain, when man realize that what they have accumulated will be taken away from them. A loss of incentives will lead to slckening in enterprise, the slackening being proportional to the extent and degree of confiscation. Thus if there will be a general slackening owing to the feeling that no branch offers any longer hope of gain. If however confiscation be mild, there will only relatively slightly falling off in economic activity." (halaman 48).

Ibn Khaldun mengakui peningnya institusi pengaturan dalam hal pembuatan kebijakan, pembuatan keuangan publik dan penjaminan dipenuhinya kebutuhan masyarakat. Berarti tidak untuk intervensi pasar dalam hal penentuan harga yang ditentukan

supply dan *demand*. Karena, “*God is the controller of the price*”. Dalam hal dorongan atau insentif tindakan, seperti telah disebutkan diatas, tidak diragukan lagi bahwa Ibn Khaldun menekankan baik alasan rasional maupun moral.

Max Weber: Sangat jelas bahwa Weber, dalam “*The protestant Ethics and the Spirit of Capitalism*”, mendukung gagasan, semangat, dan mentalitas kapitalisme yang bersumber dari ajaran agama. Manusia ditunjukkan sebagai *homo economicus*, yaitu konsep yang dari dulu hingga sekarang dalam hal penugasan kehidupan ekonomi adalah sesuai. Bahwa tujuan hidup adalah mendapatkan kemakmuran dan kekayaan yang digunakan untuk tugas melayani Tuhan.

Weber mengambil ajaran Benyamin Franklin sebagai poros berkembangnya mentalitas kapitalis, yaitu sikap memperhatikan kehidupan dengan berlaku hati-hati, bijaksana, rajin, dan bersungguh-sungguh dalam mengelola bisnis. Segi utama dari kapitalisme modern adalah memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya dikombinasikan dengan menghindari secara ketat terhadap pemakaian untuk bermewah-mewah. Prinsip ini mengungkapkan suatu tipe perasaan yang erat hubungannya dengan pemikiran keagamaan. Selanjutnya Weber menunjukkan suatu masyarakat yang sudah diwarnai oleh sifat mental kapitalis akan nampak pada kehidupan yang diarahkan pada alat produksi pribadi, perusahaan-perusahaan bebas, penghematan uang, dan mekanisme persaingan dan rasionalisasi pengelolaan bisnis.

B. Pengertian Kapitalisme Relegius

Pengertian kapitalisme relegius dengan demikian berangkat dari dasar pemikiran yang sifatnya filosofis, moral, etis, sekaligus rasional. Definisi yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

Kapitalisme religius adalah sebuah free market enterprise system dimana aktivitas ekonomi para pelakunya – yang meliputi produksi, alokasi, konsumsi, dan distribusi kekayaan- dituntun oleh etika, moral, dan semangat keagamaan.

Dapat dikatakan bahwa kapitalisme relegius adalah sistem ekonomi yang holistik yang dituntun oleh prinsip, nilai, dan norma etika agama yang dibangun atas dasar keadilan dan kebaikan (*al-adl wa'l ihsan*) bagi kemanusiaan. Tidak sekedar mekanisme aktivitas ekonomi yang mengatur alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan material dan fisik masyarakat, tapi juga untuk melengkapi kebutuhan spiritual dan intelektual.

Dengan demikian, dalam kapitalisme relegius pun diupayakan suatu optimisasi penggunaan sumber daya yang ramah lingkungan dengan memperhitungkan generasi mendatang, manajemen fiskal yang disiplin, dan adanya agenda kepedulian sosial yang melembaga.

Menjadi konsep yang berada pada jalur tengah adalah harapannya. Sesuai dengan pengertian “*awsatuhaa*” dalam Islam, atau “*chun yang*” dalam Confusius, atau “*golden mean*” yang dimaksudkan Aristoteles.

C. Prinsip dan Ciri Kapitalisme Religius

Prinsip yang kemudian terefleksi pada ciri dari kapitalisme religius yang akan diuraikan meliputi pandangan tentang manusia dan hubungannya dengan Tuhan sebagai dasar filosofis, pandangan atas kepemilikan pribadi, insentif yang mendorong tindakan, mekanisme alokasi, serta peran pemerintah dalam hal pemerataan keadilan (*distributive justice*).

Tentang Manusia dan Hubungannya dengan Tuhan. Sistem ekonomi tidak lepas dari filosofi kemanusiaan yang melatarinya. Adalah fakta bahwa sumber fenomena ekonomi dan sosial adalah manusia. Kondisi sosioekonomis dengan demikian diturunkan dari tindakan individu-individu dalam masyarakat. Maka, tindakan individu-masyarakat merupakan manifestasi dari moralitas, dan penampakan kasat mata tidak terpisahkan dengan kesadaran nilai dari dalam.

Kapitalisme religius memiliki filosofi pengembangan kemanusiaan yang sekaligus menjadi asumsi yang melatarinya. Manusia dalam sistem ini dalam bahasa confusianism adalah *chun tzu* (*perfect man*) atau *jen* (*superior man*) yang loyal terhadap moral dan memperlakukan yang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri. Dalam tradisi Islam dikenal konsep *insah salih* atau *insan kamil* (*the virtuous/perfect man*) sebagai wakil Tuhan di muka bumi, *khlaiifa Allah Fil-ard* (*God vicegerent on earth*). Atau dalam konsep manusia Kristen adalah *Imago Dei* atau *Pontifex*, yang menjembatani dunia dan akhirat. Asumsi ini adalah cita-cita untuk mencapai kemuliaan kemanusiaan, *dignity of man*. Sebagai sebuah keindahan yang tidak terbandingkan. Seperti yang diekspresikan Shakespeare dalam “*Hamlet*”:

What piece of work is a man! How noble in reason! How infinite in faculty! In form, in moving, how express and admirable! In action how like an angel, in apprehension how like a god! The beauty of the worl! The paragon of animal! (Act II, scene ii).

Aspek lain yang perlu dikemukakan adalah bahwa manusia memiliki pula etika kehendak bebas sebagai individu maupun secara kolektif. Untuk memilih berbuat baik atau buruk. Etika kehendak bebas ini diimbangi dengan pertanggungjawaban, *amanah* atau *accountability*.

Pandangan tentang Property Right. Tampaknya sistem ekonomi dibangun atas basis kepemilikan yang mengambil dua dimensi: (1) moral atau spiritual atau relegius, dan (2) material. Pada permukaannya tampaknya kedua dimensi ini berada dalam konflik tak terhindarkan, tapi akan tetap hadir bersamaan (*coexist*) selama kegiatan ekonomi dilakukan

dari produksi, alokasi, dan dan distribusi. Keseimbangannya bisa diwujudkan dengan filosofi realitas Tao, yaitu *yin* dan *yang*.

Dengan demikian, kapitalisme religius tidak menolak kepemilikan pribadi. Tapi kepemilikannya kemudian tidak lantas tidak terbatas, seperti pemikiran Aquinas dan Ibn Taymiyyah dan juga Ibn Khaldun. Dapat ditegaskan bahwa konsep kepemilikannya adalah terbatas dan relatif (*limited and relative ownership*). Bahwa pemilik dari segala pemilik adalah Tuhan Yang Maha Kuasa.

Persoalan Insentif. Ilmu ekonomi dapat dirangkumkan dalam satu kalimat, "*people responds to incentives*". Dalam kapitalisme religius, dari konsep kepemilikan yang telah dijelaskan di atas, telah jelas bahwa pertimbangan yang menjadi dorongan adalah *reason* sekaligus *ethics*. Rasional dan juga intuitif. Positif sekaligus normatif.

Pandangan tentang Mekanisme Alokasi. *Market orientation* sebagai penggerak kapitalisme didorong betul. Seagaimana pula yang dijelaskan Ibn Khaldun, peradaban Islam ditandai dengan kuatnya semangat komersial dengan dorongan pasar. Dengan demikian, telah pula terlihat dari pemikiran Aquinas maupun Ibn Taymiyyah, bahwa kegiatan komersil tidak dilarang. Kekuatan pasar, faktor *demand* dan *supply* yang akan efisien, *free of imperfection*, akan mendorong terbentuknya "*just price*" ataupun "*price equivalent*". Ditemukan pula bahwa terdapat kesamaan adanya pelarangan kegiatan rente, *usury* atau riba. Pembuktian yang komprehensif secara teoritis atas rasionalisasi pelarangan usury atau riba, termasuk di dalamnya pelarangan *interest rate*, dibahas oleh Umer Capra dalam "*Towards Just Monetary System*" (1985), dan juga Masudul Alam choudhury, dalam "*Contributions to Islamic Economic Theory: study in Social Economics*" (1986).

Tentang Peran Pemerintah dan Distributive justice. Meski kapitalisme religius menekankan betul peran pasar, terdapat pula institusi pemerintah atau *hisba* untuk mengawasi terjadinya aktivitas ekonomi secara adil, dan mencegah terjadinya manipulasi, eksploitasi, dan monopoli. Campur tangan atas penentuan harga tidak diperlukan dengan asumsi efisiensi pasar, *free of imperfection* atau *competition on even playing field*. Pemerintah mengambil tindakan saat terjadinya *market failure* akibat dilanggarnya *code of conduct* yang bermuatan moral dan semangat religius. Yang sangat patut dicegah adalah terjadinya *government failure* yang akan membuat ketidakseimbangan makin parah. Oleh karena itu rekomendasi kebijakan yang diambil tetap harus dikembalikan pada pertimbangan rasional dan etis.

Perintah agama untuk mencegah akumulasi kekayaan yang berputar hanya pada sebagian golongan saja memberikan konsepsi tentang *distributive justice*. Instrumen yang dapat digunakan dalam hal ini, sebagaimana yang telah dicontohkan, adalah pajak dan atau *zakat* (yang sifatnya wajib) dan *waqaf* (*charity*, yang sangat dianjurkan). Dengan demikian,

kapitalisme religius semestinya diinstrumentasikan dengan kebijakan publik yang hati-hati dan membawa manfaat bagi banyak pihak (*masalah mursalah*).

V. Argumentasi-argumentasi Kapitalisme Religius

Pada bagian ini akan dibahas argumentasi-argumentasi atas pertanyaan mengapa kapitalisme religius?”. Dengan mencoba melakukan kajian faktor filosofis, historis, dan juga yang bersifat futuristik.

A. Kajian Filosofis dan Peranan Semangat Religius dalam Ekonomi

Tampaknya, kapitalisme dan semangat religius dianggap sebagai pasangan yang ganjil. Sesuatu yang kontradiktif yang tidak mungkin disintesakan. Seperti halnya politik dan moral yang dikatakan Machiavelli. Kapitalisme telah menjadi kata yang berarti buruk, sebagaimana politik. Konotasi menghina ini tidak begitu jelas, tapi paling tidak serangan-serangan Marx terhadapnya merupakan penyebab penting. Sementara agama di sisi lain, dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan suci, sehingga tidak bisa dicapuradukkan dengan kehidupan duniayang penuh kekotoran.

Yang satu membawa ajaram materialistik, yang satu lagi mengajarkan spiritualitas yang berhubungan dengan Realitas Tertinggi. Yang pertama mengajarkan rasionalitas, yang kedua dianggap intuitif. Seajar pula dengan ilmu positif dan ilmu normatif.

Tetapi dapat saja keduanya disintesakan. Dengan dialektika tesis dan antitesis Hegelian. Dengan memandang kapitalisme sebagai tesis dan semangat religius sebagai antitesisnya, diharapkan menghasilkan kapitalisme religius yang diusulkan.

Filsafat I Ching tentang realitas Tao juga dapat dipakai sebagai pertimbangan. Tao sebagai suatu proses kosmik aliran dan perubahan yang terus-menerus. Dimana ada dua kutub yang membatasi perubahan tersebut, *yin* dan *yang*. Dua kutub atau kategori yang berlawanan yang merupakan satu kesatuan tunggal membentuk keseimbangan dinamis antara *yin* dan *yang*. Sesuatu yang baik bukanlah *yin* ataupun *yang*, tetapi keseimbangan dinamis antara keduanya. Sementara yang buruk atau yang mengganggu adalah ketidakseimbangan antara *yin* dan *yang*. Maka kapitalisme religius, semestinya adalah keseimbangan antara intuisi (*yin*) dan rasional (*yang*), antara normatif (*yin*) dan positif (*yang*).

Pada saat ketidakseimbangan yang terjadi, misalnya kapitalisme yang lebih dominan, maka yang timbul adalah kehidupan materialis dan kegersangan spiritualitas karena mengedepankan rasionalitas. Pada saat semangat religius yang lebih dominan sering kali dituding terjadinya fatalisme, pasivisme, dan mistikisme serta kepercayaan buta tanpa dasar rasional.

Kalau kemudian muncul kritik bahwa sebenarnya kapitalisme dan sosialisme pun dapat melalui sintesa hegelian maupun realitas Tao, sehingga katakanlah menghasilkan *mixed system* atau *Market Socialism*, maka argumen balasan yang bisa dikedepankan adalah bahwa sintesa macam tersebut bukanlah bentuk ideal yang bisa dicapai. Alasannya adalah bahwa *under capitalism man exploits man, under socialims it's just the reverse*. Apa yang harus disintesa dari hal yang tidak berbeda? Kemudian, keduanya masih mengedepankan rasionalitas karena yang melandasinya adalah sekulerisme. Sintesa tersebut masih belum bisa menghubungkan manusia kepada tujuan tertingginya, Realitas Tunggal.

Maka bila kita bicara tentang tujuan masyarakat yang lebih luas, kita benar-benar bicara tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menyangkut masalah-masalah manusia, masyarakat, dan arti kehidupan dalam hubungannya dengan agama. Kemampuan terbatas dari ideologi-ideologi keduniawian yang secara efektif digunakan untuk mengerahkan tenaga-tenaga pendorong di dalam bagian masyarakat tradisional kita ini, memiliki syarat yang berupa hubungan-hubungan tak terpisahkan dari nilai-nilai dan sikap budaya di dalam masyarakat kita dengan kepercayaan agama yang kompleks itu (Soedjatmoko, 1984).

Sehingga untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang didasari oleh sistem ekonomi yang kokoh, diperlukan penggiatan dorongan-dorongan yang mendasar. Dorongan mendasar tersebut tertanam dalam acuan budaya agama. Lagi pula, agama diturunkan untuk menjawab persoalan manusia di dunia, baik dalam persoalan makro maupun mikro. Karena itu diperlukan "pembumian" ajaran langit. Dalam artian pengamalan agama dalam segenap aspek kehidupan manusia, termasuk persoalan ekonomi. Dengan demikian, sekulerisme sudah jelas ditolak karena hanya akan menimbulkan *alienasi* (keterasingan) secara individual maupun masyarakat.

Yang kemudian diperlukan adalah penafsiran ajaran agama secara teoritis faktual sebagai dasar pengamalan, untuk insitusionalisasi dan instrumentasi ajaran. Menurut Muhammad Iqbal, periode kehidupan religius melalui masa *faith* (kepercayaan), kemudian *thought* (pemikiran) dan lantas *discovery* (penemuan). Penemuan ini adalah sampainya manusia pada Realitas Tertinggi (M. Iqbal, 1984). Dengan demikian, pada saat ilmu pengetahuan yang sifatnya empiris mulai menyeimbangkan diri norma, pada saat yang sama, ajaran agama pun diterjemahkan secara rasional. Catatannya adalah bahwa agama tetap mengakui baik pengalaman empirik dan spiritual sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Agama menekankan pengetahuan, bahkan melebihi modal. Sebagaimana dikutip Anwar Ibrahim (Asia Renaissance, 1997) adalah Ali Ibn Abi Tahlia yang berkata :

"Ya Kamil! Knowledge is better than wealth; for knowledge watches over you whilst you have

to watch over your wealth. And knowledge governs while wealth is governed. Wealth diminishes with spending but knowledge increases therewith”

Kalau diteliti, dapat ditafsirkan bahwa *knowledge-based* sebagai sumber utama kesejahteraan, sebagaimana masa modern belakangan (post-industrial), telah diisyaratkan sejak dulu. Dengan demikian, agama mendorong bangkitnya etik ekonomi.

Sebagaimana dahulu Weber menjelaskan etika Protestan dan semangat kapitalismenya. Bahwa semangat kapitalisme terdapat dalam ajaran Protestan. Dimana tujuan hidup adalah untuk mendapatkan kemakmuran dan kekayaan untuk melayani Tuhan. Dengan sikap sehari-hari yang bijaksana, rajin, dan bersungguh-sungguh dalam mengelola bisnis. Yang berarti pula sikap pencarian keuntungan yang rasional, efisien dan sistematis dengan penghitungan yang cermat dan berdasarkan situasi ekonomi yang diharapkan.

Dalam hal ini, Afzalur Rahman dalam “Muhammad sang Pedagang” juga mencoba menekankan bahwa Islam menekankan betul etos ekonomi untuk berusaha dan memperoleh keuntungan. Muslim didorong untuk memperoleh karunia Tuhan (rezeki dari hasil perniagaan) di muka bumi. Beberapa ayat Qur’an dan hadist menunjukkan hal tersebut. (lihat misalnya QS. 28:7). Kewajiban dalam Islam semacam *zakat, shadaqah, waqaf, qurban*, dan juga haji secara implisit menyuruh muslim untuk menjadi “orang kaya”. Karena mereka yang mempunyai kelebihan kekayaan sajalah yang dapat menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut.

Bagian kajian historis akan juga menunjukkan bagaimana masuknya pengaruh Islam memberi dorongan terhadap etos ekonomi masyarakat Indonesia.

B. Kajian Historis atas Etos Ekonomi Masyarakat Indonesia

Kebudayaan Indonesia asli sebelum masuknya kebudayaan Hindu – India dalam hal ekonomi bersifat *bedarfsdeckung* seperti yang dikatakan Werner Sombart. Sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terbatas. Akumulasi modal melalui usaha yang efisien dan rasional tidak menjadi tujuan. Jika keperluan hidup telah didapat, biasanya orang lantas berhenti bekerja. Etos ekonomi yang demikian tidak dapat diharapkan untuk perkembangan pembangunan ekonomi. Organisasi kebudayaan asli sebagai gotong-royong dan kekeluargaan, yang banyak dipuji-puji pemimpin ekonomi dan politik itu, hingga sekarang ternyata tidak berhasil mendorong bekerjanya ekonomi secara modern dan efisien. Bahkan kalau perlu, *crony captilism* dapat dicurigai berawal dari sini.

Perkembangan kebudayaan Indonesia-Hindu setelah datangnya agama Hindu membawa suatu corak baru, yaitu kebudayaan feodal dengan staratifikasi masyarakat berdasarkan tingkatan nilai tertentu. Dalam hal ini adalah golongan yang berbeda

berdasarkan keturunan. Kekuasaan politik timbul dari tatanan hierarkis-feodal tersebut. Sementara kaum pengrajin, petani dan saudagar (*entrepreneur*), yaitu kaum yang produktif dalam ekonomi, menempati kedudukan yang rendah. Kasta ketiga atau keempat, *waisya* atau *sudera*. Etos ekonomi dari kebudayaan terbukti pula kurang dipentingkan. Suasana hierarkis-feodalistik lebih mementingkan kehalusan hidup budaya keraton dan istana, suasana seni dan pemikiran mistik, yang menjauhi kenyataan hidup dan memandang rendah pekerjaan kasar, yang bersifat ekonomis dan mengumpulkan kekayaan atau modal.

Kemudian datanglah Islam. Kebudayaan Islam – Arab yang datang dipengaruhi oleh budaya Semit dan juga budaya Yunani. Yang terakhir disebut ini diakui mementingkan makna hidup duniawi dan rasionalitas. Islam yang datang ke Indonesia melalui para saudagar atau pedagang menunjukkan bahwa etos ekonomi memperoleh penghargaan yang cukup layak. Clifford Geertz menunjukkan bahwa kehidupan santri sebagai salah satu golongan masyarakat Jawa dengan pengaruh Islam, berhubungan dengan perdagangan dan industri (*The Religion of Java*, 1960). Keuntungan ekonomi suatu etik agama yang mendorong kehematan, kerja keras, dan usaha perseorangan, yang ditambah pula dengan bentuk pendidikan yang cenderung mendidik untuk organisasi kerja yang lebih rasional dibandingkan tradisi kaum abangan. Bahkan golongan haji dipersamakan dengan orang kaya. Terbukti pula sampai sekarang, bahwa golongan haji atau santri masih mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan ekonomi, meskipun makin kalah oleh golongan keturunan Cina. Hal ini, bahwa Islam yang datang ke Indonesia dapat memberi semangat ekonomi, ditunjukkan pula oleh Sutan Takdir Alisyahbana dalam *working paper* tahun 1972 berjudul: "Pembangunan Ekonomi dan Etik Ekonomi Islam".

Sekali lagi, organisasi kebudayaan asli sebagai gotong-royong dan kekeluargaan, yang banyak dipuji-puji pemimpin ekonomi dan politik itu, hingga sekarang ternyata tidak berhasil mendorong bekerjanya ekonomi secara modern dan efisien. Bahkan kalau perlu, *crony capitalism* dapat dicurigai berawal dari sini. Atas dasar ini pula penulis menolak Sosialisme Religius yang dikatakan Sri Edi Swasono bisa diterima oleh kita semua (lihat: Sri Edi Swasono, "Ekonomi Indonesia: Soasialisme Religius", 1981).

Kalau kemudian dikatakan bahwa dengan mendasarkan pada penjelasan Bung Hatta, sosialisme timbul karena suruhan agama, maka sudah ditunjukkan pula bahwa beberapa prinsip kapitalisme pun merupakan suruhan agama. Dalam hal ini adalah perintah untuk mencari karunia (kekayaan) dan bekerja keras serta menjalankan usaha secara rasional. Bahwa sosialisme timbul dari sumber masyarakat kita sendiri yang bercorak kolektif, maka seperti yang disinyalir Kuntjaraningrat dan juga Sutan Takdir Aslisyahbana, ini malah menghambat kemajuan ekonomi. Karena *need of affiliation* yang lebih besar dibanding *need of achievement*. *Need of achievement* yang dijelaskan David Mc Clelland sebagai asal-usul tumbuhnya masyarakat dan ekonomi entrepreneur yang nota bene adalah ekonomi kapitalis

jadi kurang berkembang. Atau dapat saja kita buat tambahan kemungkinan bahwa *crony capitalism* adalah bentuk lain sosialisme yang beradaptasi dengan tekanan pasar.

C. Kajian Futuristik tentang Masa Depan Kapitalisme dan Semangat Relegius

Kapitalisme masih akan bertahan. Bahkan Pak Francis Fukuyama berani menyatakan sebagai *the end of history*. Secara konvergen dan virtual, setiap negara mengadopsi atau berusaha mengadopsi ekonomi yang *market-oriented* dan terintegrasi menuju kapitalisme global. Alasannya jelas, meningkatnya kompleksitas dan intensitas informasi kehidupan modern pada saat yang bersamaan membuat *centralized planning-economy* menjadi sangat sangat sulit, kalau tidak mau dikatakan tidak memungkinkan. Tulisan Leonard E. Read, "*I Pencils*" secara provokatif tapi mengasyikan, menunjukkan kesangatsulitan pengaturan tersebut. Sistem kapitalisme pasca perang dunia kedua juga telah menjadi *natural stopping point*, yang mendorong banyak negara agraris dan industri untuk mengejar ketertinggalannya dari Amerika. Alasan selanjutnya adalah kegagalan yang dialami komunisme. Sepertiga masyarakat dunia yang menggunakan ekonomi komunis telah memutuskan untuk bergabung dengan sistem kapitalisme.

Memang masih kapitalisme. Tapi kapitalisme pun mengalami perubahan. Kata Lester Thurow,

"It's still going to be capitalism, but it's going to be a very different capitalism. In other words, we know the forces that are going to determine the future of capitalism. But we don't know is the exact shape of the future, because that's not determined by stars; it's determined by what we do". (Rethinking the future, hal 237).

Sesungguhnya kapitalisme pun mengalami goncangan. Yang tampak dari manifestasi permukaannya sekaligus adanya perubahan fundamental yang mendalam sebagai struktur ekonomi global. Thurow merujuk pada lima kekuatan. Pertama, berakhirnya komunisme. Kedua, pergeseran dari industri yang *natural resource-based* ke industri yang *manmade brainpower* atau yang *knowledge-based*. Ketiga, faktor demografis; tumbuhnya populasi dunia yang sekaligus makin tua. Keempat, sampainya masa *genuinely global economy*. Terakhir, hilangnya dunia yang unipolar, tidak ada lagi kekuatan ekonomi dan politik yang dominan. Gesekan-gesekan kekuatan ini menimbulkan perubahan lingkungan industri, edologis, teknologis, sosiologis, psikologis, ekologis, dan seterusnya. Dalam hal ini, teknologi dan ideologi ditunjuk sebagai kekuatan utama yang besar.

Goncangan-goncangan yang demikian menimbulkan ketidakpastian yang makin besar, yang seringkali membuat masyarakat terkejut, gugup, kaget dan terbata-bata. Ujung-ujungnya krisis global. Krisis moneter global yang menyebabkan banyak negara yang juga menganut sistem kapitalisme mengalami kebangkrutan, terlepas apakah kapitalisme *erzats*,

crony, maupun tulen, Donella Meadows dalam “*Beyond the Limit : Global Collapse or Sustainable Future*”, menyebut *overshooting* sebagai penyebab utama berbagai krisis yang terjadi. Dalam kapitalisme global belakangan ini, setiap sumber daya alam digerogeti, dan setiap industri berpacu dengan percepatan produksinya. Kata Meadows lagi, penyebab *overshooting* selalu sama. Adanya pergerakan dengan tempo tinggi, adanya batas dimana perubahan semestinya tidak melampauinya, dan adanya kesulitan dalam melakukan kontrol karena kelengahan, respon yang terlambat, dan momentum yang tidak tepat.

Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai membuat pelaku ekonomi hanyut dalam keharusan pertumbuhan. Seolah tidak ada batas pertumbuhan, bagi pembangunan. Akibatnya adalah hilang kontrol, dan tidak dapat melihat titik-titik lemah pertumbuhan yang terlalu kuantitatif tersebut. Dalam paradigma lama ini, terdapat benih-benih krisis, yang potensial menciptakan *chaos* yang berulang-ulang di masa depan.

Paradigma ekonomi masa depan yang progresif sekaligus adil tentunya tidak dapat bertumpu pada satu model yang tidak mampu mengontrol kompleksitas yang telah diciptakannya sendiri. Dengan demikian, mengubah beberapa fondasi sistem ekonomi global diperlukan untuk membuatnya makin berbagai bantingan krisis.

Hazel Handerson mengusulkan paradigma *greenomics*, yang katanya berpandangan jauh ke depan, *beyond economics*. Beberapa ciri dari *greenomics* ini di antaranya adalah sifat yang holistik, integral, kualitatif, *win-win solution*, dengan indikator-indikator baru pembangunan yang menekankan pada tujuan sosial, investasi yang bertanggung jawab secara sosial, orientasi pada pengembangan diri ketimbang gaya hidup, produk dan konsumsi hijau dan seterusnya.

Lester Thurow dalam “The Future of Capitalism”, mengatakan bahwa kapitalisme masih akan berlanjut meskipun mengalami beberapa perubahan. Ia memajukan eksperimen sosial dengan menciptakan prinsip, norma, dan aturan-aturan sosial baru yang sesuai dengan perkembangan ekonomi. Sehingga, semakin berkembang ekonomi dan teknologi, semakin berkembang pula komponen normatif masyarakatnya.

Usulan yang lain dimajukan Rich DeVos, yang menawarkan satu model kapitalisme yang berwajah lemah lembut dan penuh belas kasih. *Compassionate capitalism*. Kapitalisme dengan kepedulian sosial, sebagai masa depan perekonomian sekaligus relasi sosial dunia. Konsepnya digali dari pemikiran ekonomi klasik Adam Smith. Bahwa meskipun manusia diatur oleh nafsunya, namun ia juga memiliki kemampuan penalaran dan belas kasihan. Ia mampu mengontrol nafsu tersebut dengan penalarannya sendiri, dengan kekuatan moralnya sendiri. Tak mengapa *self-interest* dibebaskan, terutama *need of achievement* dan keinginan bersaing. *Laissez faire* tetap dikibarkan, biarkan orang bertindak sendiri. Tidak perlu ada campur tangan dalam perwujudan *self-interest* tersebut, termasuk kebaikan dan kemurahan

hati, soal kemasyarakatan dan kemanusiaan. Dengan sendirinya perbuatan mulia akan terdorong apabila orang melihat ada keuntungan di dalamnya. Nanti, hati nurani orang yang mengontrol tindakannya, karena asumsi yang dipegang DeVos bahwa setiap orang menyimpan dorongan melakukan yang baik. Dengan demikian, kapitalisme dibangun di atas landasan hati nurani tersebut.

Landasan moral dari *compassionate capitalism* yang ditawarkan DeVos adalah perasaan simpati yang mendalam terhadap penderitaan orang lain, dan diiringi hasrat meringankan beban tersebut. Urusan bisnis dipandang sama penting dengan urusan kebajikan sosial. Kapitalis menghabiskan waktunya untuk meraup keuntungan besar, tapi pada saat yang sama menghabiskan waktu untuk melakukan kewajiban sosial.

Sebenarnya, Adam Smith pun telah menganjurkan keseimbangan antara *self-interest* (untuk persaingan, profit, dan akumulasi kekayaan) dengan panggilan hati nuraninya untuk kebaikan dan perbuatan mulia. Dengan tetap menganjurkan persaingan bebas, sebab persaingan bebaslah yang membuat kapitalisme berjalan. Juga motif memperoleh profit dan akumulasi kekayaan, karena kekayaan itu perlu untuk kesuksesan usaha dan kemakmuran bangsa.

Dengan demikian, kurang lebih juga sama dengan apa yang ditawarkan Fukuyama sebagai *the spiritualization of economic life*. Melengkapi rasionalisme neoklasik yang delapan puluh persen dengan *the twenty percent solution* yang memberi muatan semangat spiritual. Berarti proses historis manusia telah dipahami dengan keterkaitan dua kekuatan utama. Yang pertama, rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan material melalui akumulasi kekayaan. Dan kedua, keinginan untuk mencapai esensi sebagai *moral beings recognized by other human beings*.

Kalau diperhatikan, pandangan-pandangan di atas, baik dari Meadows, Handerson, Thurow, dan Fukuyama, masih terlihat sekularistik. Keterlibatan norma, nilai dan moral sekedar dihubungkan dengan keharmonisan diri manusia dan ekosistemnya. Tujuan yang lebih tinggi dapat dicapai dengan ikatan yang lebih kuat. Semangat religius yang menghubungkan manusia dengan Penciptanya, Tuhan yang Maha Esa. Tapi setidaknya, ada satu hal yang penting untuk dicatat, bahwa timbul dorongan untuk mencapai satu kesadaran yang lebih tinggi, yang mungkin selama ini cenderung dipinggirkan, dimarginalkan, dan dianggap tidak penting. Moral, etika, spiritualitas, dan semestinya: kesadaran agama!

Ini sejalan dengan salah satu tema besar yang digagas John Naisbit dalam Megatrend 2000 tentang kebangkitan agama milenium ketiga. Bahwa pada fajar milenium ketiga terdapat tanda-tanda jelas dari kebangkitan agama di seluruh dunia. Ketika orang terpukul oleh perubahan, kebutuhan akan kepercayaan spiritual yang kokoh makin kuat. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi tidak memberi arti kehidupan. Arti hidup diperoleh melalui sastra, seni, dan spiritualitas.

Di atas telah diuraikan pula tentang peranan agama bagi pembangunan ekonomi, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Namun penekanannya adalah bahwa agama menghindarkan dari sekularisme. Membuat tujuan lebih konsisten dan *sustainable*.

VI. Penutup

Masa depan tidak dapat diketahui pasti, walaupun paling tidak kita dapat melihat tanda-tandanya. Seperti kata Aristoteles, kita dapat mengubah masa depan karena kita tidak mengetahuinya: kalau masa depan sudah diketahui, maka kita tidak dapat mengubahnya. Masa depan tergantung dari apa yang kita lakukan saat ini, dan semuanya dapat berharap bahwa kita dapat menjumpai hari esok yang lebih baik.

Sebagaimana ilmu ekonomi mengajarkan, kita senantiasa dihadapkan pada pilihan-pilihan. Demikian juga dengan sistem ekonomi yang merupakan bagian dalam pembentukan hari depan yang lebih baik. Paling tidak keluar dari krisis yang sudah berkepanjangan ini. Dan berikut-berikutnya lebih siap dan lebih tahan uji dengan bermacam cobaan yang datang. Kita berurusan dengan persoalan besar, yang sangat menentukan kinerja perekonomian yang lebih *sustainable* tersebut. Sebagaimana disebut didepan, pilihannya ada dua, menjalankan yang sudah ada atau menawarkan alternatif baru. Alternatif baru ini, bisa sama sekali baru, atau membuat yang sudah ada dengan beberapa penyesuaian-penyesuaian yang - kalau memang perlu - sifatnya fundamental.

Yang ditawarkan disini adalah sebuah konsep yang disebut dengan kapitalisme religius yang melalui penggalian konsep-konsep klasik dari Thomas Aquina, Ibn Khaldun, Ibn Taymiyya, dan Max Weber. Yang juga disandingkan dengan kajian-kajian futuristik pemikir-pemikir kontemporer. Kejelasan konsep yang dituntut dimiliki oleh sebuah sistem ekonomi telah dicoba dijawab melalui pengkajian historis, sosiologis, dan juga filosofis. Hasilnya adalah tawaran prinsip dan ciri sebagai sesuatu yang bisa diwujudkan. Bisa jadi akan menjadi konsep yang utopis, tapi memang demikianlah nasib suatu sistem yang menurut Karl Menheim belum bisa diwujudkan. Sebagaimana dahulu kapitalisme dianggap utopis. Sebagaimana agama-agama harus menghadapi ujian untuk mencapai kejayaannya.

Pengertian dasar tentang sistem ekonomi dimanfaatkan untuk pemahaman pembahasan lanjutannya, juga untuk penyusunan konsep kapitalisme religius itu sendiri. Dari kajian historis diperoleh catatan bahwa kapitalisme ditonjolkan untuk membangkitkan daya cipta masyarakat, mendorong penguatan *need of achievement* dalam masyarakat sebagai basis pembangunan *entrepreneurial economy* yang lebih mantap. Untuk keluar dari krisis, dengan membangkitkan insentif ekonomis yang rasional yang tidak terlepas dari norma dan moralitas. Sekaligus untuk menjawab tantangan global yang ditandai persaingan yang makin tajam. Bagi bangsa Indonesia sudah sewajarnya semangat religius dibangkitkan

mengingat keanekaragaman agama yang ada dan pengaruh nilai agama yang sangat besar pada berbagai aspek kehidupan.

Kajian filosofis menunjukkan bahwa kapitalisme religius adalah proses dialektika dari sistem bumi dan sistem langit. Harmonisasi rasionalisme dan spiritualisme. Yang positif dengan *Yin* normatif. Pembahasan futuristik menunjukkan bahwa kapitalisme bisa jadi sebagai *end of history*. Tapi tidak lantas memberhentikan tantangan-tantangan sosial yang muncul. Kapitalisme yang mengalami perubahan, dan guncangan-guncangan. Semangat religius bisa jadi yang membuat perubahan-perubahan tersebut. Sejalan kebangkitannya di milenium ketiga ini.

Tawaran kapitalisme religius ini adalah untuk masyarakat Indonesia, meskipun tidak ada salahnya juga dimajukan sebagai salah satu kajian futuristik, sebagai sistem ekonomi global masa depan karena membawa nilai-nilai yang universal.

Sebenarnya, kita yang menentukan apa yang kita inginkan dapat diwujudkan atau tidak. Sistem apa pun itu kalau dinilai baik, perlu diupayakan untuk direalisasikan. Tentunya dengan memperhitungkan keterkaitannya dengan faktor-faktor lain yang juga signifikan dalam membawa transformasi sosial, yang dalam hal ini perkembangan ekonomi secara kualitatif maupun kuantitatif.

Atau kita menempatkan diri kita di dalam *le strategy de fatale* Baudrillard yang penuh paradoks: tidak menerima, tidak menolak, tidak mengkritik, tidak menyanjung situasi yang ada, tidak berbuat apa-apa! Peduli amat!

Kalau masih ada semangat, seperti kata Muhammad Iqbal, “mendatangkan kehidupan dari dunia sendiri, menyalakan api yang tersembunyi dalam dunia sendiri” kalau dunia yang sekarang tidak sesuai dengan keinginan kita. Entah mana yang *first best choice*, mana pula yang *second best choice*...

Daftar Pustaka

Alisyahbana, Sutan Takdir, **Pemikiran Islam dalam Menghadapi Globalisasi dan Masa Depan Umat Manusia**, Jakarta: Dian Rakyat, 1992.

Barney, Jay B., and William Hesterly, “**Organizational Economics: Understanding the Relationship between Organizations and Economic Analysis**,” in Handbook of Organizational Studies, by Stuart R. Clegg et al, London : Sage Pub, 1996

Iqbal, Muhammad., **The Reconstruction of Religious thought in Islam**, Lahore: Institute of Islamic Culture, 1984.

Kunio, Yoshihara, **Kapitalisme Semu Asia Tenggara**, Jakarta: LP3ES, 1990

- Kuntowijoyo, **Identitas Politik Umat Islam**, Bandung: Mizan, 1997.
- McClelland, Daid, **The Achieving Society**, 1961.
- Macro, Orra', et al., ed., **The Economic Organization of East Asian Capitalism**, California:Sage, 1997.
- Naisbitt, John and Patricia Aburdene, **Megatrend 2000**, JakartaBinarupa Aksara, 1990
- Naqvi, N. H, **Ethics and Economics: an Islamic Synthesis**, London, Islamic Foundation, 1981.
- Okada, Konsuke, and Juro Teranishi ed., **Markets and Government: In Search of Better Coordination**, Tokyo: Maruzen, 1998.
- Pilian, Yasraf Amir,**Sebuah dunia yang Dilipat**, Bandung: Mizan, 1998.
- Rahardjo, Dawam, ed., **Pembangunan Ekonomi Nasional**, Jakarta:Intermasa, 1997.
- Sadli, M. ed., **Mencari Bentuk Perekonomian Indonesia Perkembangan Pemikiran 1965-1981**, Jakarta, Gramedia, 1982.
- Savage, Charles M. **The 5th Generation Management: Integrating Enterprise Through Human networking**, Digital Press, 1990.
- Simon, Herbert, “**Organizations and Markets**”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, No. 2, Spring 1991.
- Soedjatmoko, **Dimensi Manusia dalam Pembangunan**, Jakarta: LP3ES, 1995.
- , **Etika Pembebasan**, Jakarta: LP3ES, 1984.
- Speechler, Martin C., **Perspectives in Economic Thought**, Singapore: McGraw Hill, 1990.
- Sudrajat, Ajat, **Etika Protestan dan Kapitalisme Barat: Relevansinya dengan Islam Indonesia**, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Swasono, Sri Edi ed., **Sistem Ekonomi dan Demokrasi ekonomi**, Jakarta:UIP, 1987.
- Thurow, Lester, **The future of Capitalism**, London; Nicholas Brealey Pub, 1996.
- Zoreh, Ahghari, “**The Origin and Evolution of Islamic Economic Thought**”, Dissertation, The Florida State University, 1991.